



# we prevent crime

public media of criminology



## Merangkai Memori Penghilangan Paksa

Oktober 2013  
Desain Sampul : Firyani Nainunus  
Foto : TM. Luthfrhan P.  
GRATIS

EDISI

13

## TIM REDAKSI

Penanggung Jawab  
Ketua Himakrim

Pemimpin Umum  
Arief Tri Hantoro

Pemimpin Redaksi  
Tubagus R. Ramadhan

Redaktur Pelaksana  
Andreas Meiki Sulistyanto

Redaktur Bahasa  
Hardiat Dani Satria

Koordinator Litbang  
Wara Aninditari L.H.

### Redaksi

Ayu Permata Yuliana, Kahfi Dirga C., Albert Wiryu S., I.G.N Aditia T.a, Yuriko F.A., Suci Khairunisa N., Gusmara Agra U., M. Ridho Intifada, Miranda Olga Viola

### Fotografer

M. Luthfian P., Tyas Wardhani

### Artistik dan Lay out

Arief Tri Hantoro, Firyan Nainunus, Christo Emanuel, Lidya Apriliani

### Kontributor Cerbung

Harris Kristanto

### Perusahaan

Ginonggom Manulang

### Media dan Relasi

Yanuar Permadi

### Marketing dan Sirkulasi

Tua Maratur Naibaho

Redaksi :

Gedung Nusantara 1  
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Universitas Indonesia  
No. Tlpn 085719443917

Kritik dan saran dapat dikirimkan ke email [wepreventcrime](mailto:wepreventcrime).

[www.wepreventcrime.wordpress.com](http://www.wepreventcrime.wordpress.com)

[wepreventcrime@yahoo.co.id](mailto:wepreventcrime@yahoo.co.id)

[@wepreventcrime](https://twitter.com/wepreventcrime)

Sebagai sebuah negara, tentu banyak hal yang telah dilalui oleh Indonesia. Dari kelam suram masa penjajahan, hingga fenomena *seleb* dadakan karena penggunaan diksi.

Semua terekam dengan baik, menjelma menjadi memorabilia, sejarah, atau hanya ingatan semata. Tentu tidak semua dari peristiwa tersebut diinginkan, sehingga banyak dari peristiwa-peristiwa tersebut tak ingin diingat kembali atau bahkan dinafikkan. Buletin **wepreventcrime** mengangkat tajuk penghilangan bukan sekedar pemicu ingatan kita tentang mereka, yang mungkin sudah mulai memudar di sudut ingatan kita. Namun sebagai pengingat nalar kita bahwa ada yang salah dengan hilangnya mereka. Cukupkah mereka hanya dijadikan sejarah dan penjeraman? Atau kehadiran mereka dalam benak kita menguap perlahan, yang pada akhirnya akan sirna seperti keberadaan jasmani mereka? Ini tentang kisah kelam. Ini tentang kisah penghilangan. Ini tentang perjuangan mereka, tentang rezim yang berkuasa.

Redaksi

## KONTEN



- 3 REFLEKSI**  
Perjuangan Panjang Hak Asasi Manusia
- 4 KRIMINOLOG BERBICARA**  
Penghilangan Paksa
- 5 KAJIAN KITA**  
Lenyap Tanpa Jejak
- 6 RISET**  
Tanpa Kepedulian?
- 7 PROFIL**  
Dibalik Meja KontraS
- 8 REPORTASE**  
Kamis : Sebentuk Aksi Untuk Mereka
- 9 TIPS AND TRICK**  
Sedikit Cerita di Ujung Sana
- 10 OPINI POJOK**  
Surat Untuk Penguasa Negeriku
- 11 ANEKDOT**  
Hilang Yang Berbeda
- 12 CERBUNG**  
Utuh yang Setengah - Part 3
- 13 OLIMPIAS 2013**  
KABAR KAMPUS PUBLIKASI HIMAKRIM
- PO & JOX**  
Titipan Yang Hilang

## QUOTE'S

"seumpama bunga, kami adalah bunga yang dirontokkan di bumi kami sendiri"

-Wiji Thukul-







# Perjuangan Panjang Hak Asasi Manusia

*Apabila usul ditolak tanpa ditimbang*

*Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan*

*Dituduh subversif dan mengganggu keamanan*

*Maka hanya ada satu kata: Lawan!*

(Solo, 1986)

**P**eringatan adalah sebuah puisi karya Wiji Thukul, seorang seniman yang menjadi satu dari 13 aktivis korban penghilangan paksa di tahun 1997/1998 silam. Bait terakhir yang pada puisi yang terinspirasi dari frasa akhir puisi "Sumpah Bambu Runcing" ini menjadi kalimat yang selalu diteriakan setiap aksi rakyat Indonesia. Lelaki yang aktif di JAKKER (Jaringan Kerja Kesenian Rakyat) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dilaporkan hilang oleh istrinya, Sipon, tahun 2000 ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances (CPED)* diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada 20 Desember 2006, merupakan penindaklanjutan *United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID)* yang mengidentifikasi adanya "*legal-gap*" dari instrumen-instrumen hak asasi manusia terkait kasus penghilangan paksa. Konvensi ini telah berlaku sejak 23 Desember 2010 dengan jumlah Negara Pihak 29 dan 88 negara penandatanganan, termasuk Indonesia, namun baru diratifikasi oleh 20 negara anggota. Agar korban penghilangan paksa tidak terlupa dan guna mengakui tuntutan keluarga yang ditinggalkan, maka setiap tanggal 30 Agustus ditetapkan sebagai hari penghilangan paksa internasional.

Dalam konteks Indonesia, penghilangan paksa tidak terlepas dari dinamika politik dan rentan terjadi pada masyarakat sipil penggiat gerakan penentang rezim otoriter. Kekacauan situasi politik Indonesia dipenghujung rezim Orde Baru, dimulai dari penyerangan kantor PDI tanggal 27 Juli 1996, Pemilihan Umum 1997, krisis ekonomi global, Sidang Umum Majelis MPR tahun 1998, hingga demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan Mei 1998 telah memicu terjadinya penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis. Saat itu diduga kuat 23 orang yang hilang karena aktivitas politiknya, satu orang ditemukan tewas, sembilan orang dikembalikan dan 13 lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Praktik penghilangan paksa tak hanya terjadi pada rezim



Wara Aninditari L.H. mahasiswa kriminologi 2010

Soeharto, tetapi juga pada peralihan Orde Lama ke Orde Baru, yakni persekusi terhadap mereka yang dituduh komunis atau simpatisannya. Penghilangan paksa juga pernah terjadi selama operasi militer di Timor-Timor (1975-1999), masa pra-perjanjian damai di Aceh tahun 2005, dan beberapa wilayah konflik di Papua. Saat ini berbagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang penegakan hak asasi manusia sedang berupaya mendorong diratifikasi dan dibuatnya Undang-Undang khusus tentang penghilangan paksa.

Kita mungkin memang mengenal istilah "September Hitam", sebagai peringatan terjadinya beberapa kasus pelanggaran HAM, namun itu hanyalah momentum. Pemahaman akan pentingnya menjunjung tinggi martabat manusia sebagai dasar dari penghormatan kita terhadap hak asasi manusia adalah sebuah proses pembelajaran panjang. Mari bersama kita biasakan adil sejak dalam pikiran.

**Wara Aninditari Larascintya Habsari  
Alumni Sekolah HAM untuk Mahasiswa  
(SeHAMA) 2013**



## Penghilangan Paksa

*Cara yang paling efektif untuk tidak mengulang pengalaman buruk dimasa lalu adalah jika kita menolak untuk lupa. Filsuf Spanyol George Santayana mengatakan, "mereka yang tidak dapat mengingat masa lalunya akan dikutuk untuk mengulangnya kembali."*

**T**he Universal Declaration of Human Rights yang diprakarsai oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948, bukan sekadar dokumen bagi masyarakat internasional. Deklarasi ini merupakan perwujudan dari tekat bangsa-bangsa di dunia untuk menjaga keadilan yang berperikemanusiaan. Pasal 10 dari deklarasi tersebut menyatakan, bahwa setiap orang memiliki hak sepenuhnya untuk diadili oleh pengadilan yang tidak tunduk pada kekuasaan atau pengaruh apapun (*independent*) serta tidak memihak (*impartial*) guna menentukan apakah ia bersalah atas kejahatan yang didakwakan kepadanya. Pasal 11 ayat 1, menjunjung asas praduga tidak bersalah yang pada intinya me-

nyatakan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan bahwa ia melakukan kejahatan melalui mekanisme hukum dan pengadilan yang terbuka untuk umum serta kepadanya diberikan jaminan bahwa ia berhak untuk melakukan pembelaan diri.

Tiga tahun sebelum PBB mendeklarasikan hak-hak asasi manusia yang universal, para pendiri Bangsa (*founding fathers*) telah meletakkan lima pilar filosofis yang menunjang berdirinya Bangsa Indonesia yang merdeka dalam konstitusi 1945, yang lebih kita kenal dengan Pancasila. Sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama bangsa ini adalah menjadi bangsa yang memanusiakan manusia dan menjalankan keadilan secara beradab.

Nilai-nilai keadilan yang berperikemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dan deklarasi HAM PBB sebenarnya telah diejawantahkan dalam hukum acara pidana Indonesia. Seseorang yang dinyatakan oleh penguasa sebagai musuh negara dan musuh masyarakat sekalipun, harus dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan yang terbuka untuk umum, diberikan hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang meringankan, memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan atau intimidasi, diberikan akses untuk menghubungi keluarganya, penasihat hukumnya, dokternya dan rohaniwan. Ia juga ditempatkan di suatu tempat yang jelas dimana badan-badan kemanusiaan dapat menemukannya dengan mudah.

Dimasa lalu, kasus-kasus penghilangan paksa oleh rezim yang berkuasa dilakukan terhadap lawan-lawan politik penguasa, para rohaniwan yang menentang ketidakadilan sosial, mereka yang memilih untuk bersikap tidak mengikuti arus utama (*mainstream*), mereka yang menunjukkan warna yang berbeda tanpa melalui suatu proses peradilan.

Penghilangan paksa bukanlah merupakan proses hukum namun lebih merupakan strategi Politik *Machiavelian* yang memaksakan kepatuhan atas dasar rasa takut. Kontrol absolut diberlakukan dan ruang untuk berbeda atau berwarna lain dipersempit atau dimatikan. Penghilangan paksa merupakan strategi meredam gerakan-gerakan individual agar tidak berubah menjadi gerakan kelompok yang berpotensi



<WPC\_Luthfian> Payung yang bertuliskan Tuntaskan Tragedi 65





<WPC\_M. Luthfian> Dibunuh Karena Benar

untuk bertransformasi lagi menjadi gerakan massal. Akan sangat sulit bagi penguasa untuk meredam perlawanan massa, namun lebih mudah menghilangkan elemen-elemen yang dapat memberikan kontribusi pada gerakan massa tersebut.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa ketika hukum menjadi subordinat politik dan penegak hukum terkooptasi kedalam kekuatan-kekuatan politik, maka penghilangan paksa menjadi jalan pintas atas nama stabilitas nasional. Tokoh-tokoh pergerakan sosial seperti Buruh Marsinah, wartawan Udin, penyair Wiji Thukul mendadak lenyap, dan tidak terhitung figur-figur politik yang juga hilang tak tentu rimbanya. Negara dijadikan negara polisi, dimana polisi justru tidak berfungsi. Penghilangan paksa adalah simbolisasi kegagalan hukum menjadi penyeimbang antara kekuasaan dan kehendak rakyat.

Cara yang paling efektif untuk tidak mengulang

pengalaman buruk dimasa lalu adalah jika kita menolak untuk lupa. Filsuf Spanyol George Santayana mengatakan "mereka yang tidak dapat mengingat masa lalunya akan dikutuk untuk mengulanginya kembali." Kita tidak ingin kembali ke masa yang kelam. Harus ada elemen kontrol atas kekuasaan. Dimasa lalu, elemen kontrol seperti hukum dan gerakan sosial dimandulkan. Pada saat itulah ditemukan kebenaran dalam perkataan Lord Acton "*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.*" Dimasa sekarang, ekuilibrium antara kehendak kekuasaan dan kehendak masyarakat hendaknya ditegakkan melalui hukum yang adil dan beradab untuk menghindari Indonesia jatuh kedalam dua kutub yang ekstrim: Negara absolut atau negara anarkis.

Ferdinand T. Andi Lolo  
Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI

# MARI BERKARYA

Kirim karyamu dalam bentuk tulisan  
foto, video dan lain sebagainya ke  
[wepreventcrime@yahoo.com](mailto:wepreventcrime@yahoo.com)

Karya kamu akan dimuat di  
[wepreventcrime.wordpress.com](http://wepreventcrime.wordpress.com)



@wepreventcrime





# Lenyap Tanpa Jejak

*la hilang tak berbekas. Tak lagi ada yang tahu, meski sudah banyak yang mencari. Hidupnya pelik, terus berlari, menghindar, bersembunyi dan melawan! Hingga akhirnya perlawanan penyair pelo ini sirna tak berjejak. Ia adalah Wiji Thukul, salah seorang penyair radikal sekaligus korban penghilangan orang secara paksa empat belas tahun silam.*

Sejarah mencatat, tindakan kriminal penghilangan paksa diciptakan oleh Adolf Hitler dalam *Nacht und Nebel Erlass* (Dekrit Malam dan Kabut) yang dikeluarkan tanggal 7 Desember 1941 (Citroni & Scovazzi, 2009:90). Sejak hari itu, ratusan ribu orang telah menjadi korban kejahatan ini. Malangnya, Komisi anti kejahatan ini melihat kebangkitannya di Amerika Latin di tahun 1950-an dan kemudian menyebar ke seluruh dunia (*Amnesty Internasional*, November 2011: 6).

Menilik ide dasarnya dapat diarahkan bahwa penghilangan paksa merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dalam mempengaruhi sejumlah hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak sewenang-wenang dirampas kebebasannya, hak untuk tidak disiksa atau perlakuan tidak manusiawi, kejam atau merendahkan lain, hak keamanan, hak atas perlindungan hukum (Citroni & Scovazzi, 2009:90). Apa yang dimunculkan dalam makna ini merupakan sebuah gambaran besar efek dari penghilangan paksa. Manusia bukanlah benda yang dapat dengan mudah hilang tanpa membekas.

## Luka Lama

Di Indonesia, masalah penghilangan paksa mulai terkuak semenjak pembantaian anggota PKI tahun 1965 silam. Antara 1 hingga 3 juta orang diperkirakan hilang. Jumlah penghilangan paksa kemudian bertambah lagi selama bertambahnya konflik agraria di tahun 1983-1984. Tak cukup sampai di situ, kasus lainnya yang juga berkaitan dengan penghilangan paksa yakni insiden Tanjung Priok 1984, penembakan di Talangsari Lampung 1989, penyerangan kantor pusat PDI (Partai Demokrasi Indonesia) 1996, dan kemudian kasus perlawanan rezim Orde Baru 1998-1999.

Penghilangan paksa tidak hanya terjadi dalam waktu yang singkat, tapi juga dengan jangka waktu cukup lama. Selain itu, penghilangan paksa juga terjadi di daerah yang memiliki catatan konflik yang cukup panjang. Di beberapa daerah konflik seperti Maluku, Aceh, dan Papua, penghilangan paksa adalah harga mahal yang harus dirasakan oleh sebagian warga di sana. Setelah DOM (Daerah Operasi Militer) dideklarasikan di Aceh pada tahun 1989-1998, tercatat lebih

dari 392 orang menghilang (Yurino, Untung, Kanesia, Kusnadi, 2011:118). Belum lagi di beberapa daerah seperti Papua dan Maluku yang masing-masing memiliki kasus penghilangan paksa sebanyak 23 dan 2 kasus.

Jika dilihat dari keadaan kejadian penghilangan paksa di atas, hampir semuanya melibatkan negara. Penghilangan paksa secara politis dimotivasi oleh negara. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 di Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa, yaitu penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.

Masih dalam konteks ini, dapat dipahami penghilangan paksa yang terjadi juga dapat dikaitkan dengan kondisi politik pada waktunya (Yurino, Untung, Kanesia, Kusnadi, 2011:119). Penghilangan paksa yang terjadi pada tahun 1965-1966 berkaitan erat dengan munculnya paham kebencian terhadap ideologi komunis. Sejak saat itu—beralih stabilitas dan keamanan negara—Orde Baru kemudian melegalkan kegiatan penghilangan paksa dikemudian waktu.

Orde Baru tak sendiri, lewat elemen pertahanannya TNI, rezim itu kemudian mencomot banyak orang yang dianggap berbahaya bagi negara. Tak segan-segan, rezim saat itu kemudian menghilangkan dengan cara yang tak manusiawi. Ini yang kemudian menjadi sebuah ironi atas keadaan yang menimpa para keluarga korban penghilangan paksa. Menunggu dan termangu tanpa ada kepastian. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi tentang Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan Paksa: Tindakan penghilangan paksa apa pun yang membuat orang yang menjadi korbannya berada di luar perlindungan hukum dan menyebabkan penderitaan berat bagi mereka dan keluarga mereka





<WPC\_Firyana Nainunus> Foto Korban-korban Penghilangan Paksa

### Ujian Yang Gagal

Melihat gambaran luka di atas, nampaknya banyak makna yang dapat digali lebih dalam lagi. Salah satunya dengan merunut siapa yang menjadi dalang atas adegan-adegan anti humanitas ini. Seolah negara adalah panggung yang menyuguhkan kisah orang-orang dipaksa untuk menghilang. Kerangka besar ini kemudian memunculkan anggapan bahwa negara lah yang mengatur jalannya adegan.

Berangkat dari asumsi tersebut maka dalam konteks kenyataannya yang dilakukan negara merupakan sebuah tindakan kejahatan. Di mana ada usaha untuk mendominasi kekuasaan di suatu negara. Pada dasarnya, kejahatan negara (*state crime*) dapat diartikan sebagai segala tindakan yang menurut hukum disebut sebagai kejahatan, yang dilakukan oleh para pejabat negara terkait dengan jabatan atau kedudukan mereka sebagai perlambang wakil suatu negara (Chambliss, 1989: 184). Berdasar itu juga kemudian memasukan penghilangan paksa sebagai bagian dari *state crime* itu sendiri.

Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh negara menimbulkan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) (Green & Ward, 2004: 2). Dalam konteks ini, penghilangan paksa juga berkaitan dengan pelanggaran HAM yang cukup berat. Seperti salah satu kasus penghilangan paksa pada masa Orde Baru kitaran tahun 1983-1984, saat itu terkenal dengan operasi Petrus (Penembak Misterius). Sasarannya

adalah para preman yang dianggap mengganggu keamanan negara. Diperkirakan kitaran 300 orang dieksekusi, dan lainnya hilang.

Rezim tangan besi akhirnya runtuh pada tahun 1998. Sesaat sebelum runtuh, kasus penghilangan paksa masih dilakukan. Rezim itu menasar beberapa aktivis-aktivis yang dianggap mengganggu stabilitas negara. Meski sudah terkuak siapa eksekutornya—Tim Mawar—namun pengadilan tak menemukan siapa dibalik dari Tim Mawar. Alhasil, tak banyak informasi yang dapat terkuak.

Memasuki reformasi tidak menjamin hilangnya praktik penghilangan paksa oleh negara. Salah satu kasus yang sempat menyita waktu isu HAM, yakni kematian aktivis HAM, Munir. Munir yang menjadi korban penghilangan paksa menjadi permasalahan yang cukup penting. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut kasus ini sebagai "*test of our history*," sayang pemerintah nyatanya gagal dalam ujian itu. Polycarpus yang menjadi eksekutor diadili selama 20 tahun. Lebih parahnya lagi, tersangka Muchdi Purwopradjono, mantan Deputi V Bidang Penggalangan Badan Intelijen Negara, dibebaskan pengadilan (Majalah Tempo, Edisi 13-19 Mei 2013: 38). Penghilangan orang secara paksa merupakan bukti negara masih melakukan kejahatan sebagai cara untuk melanggengkan kekuasaannya.

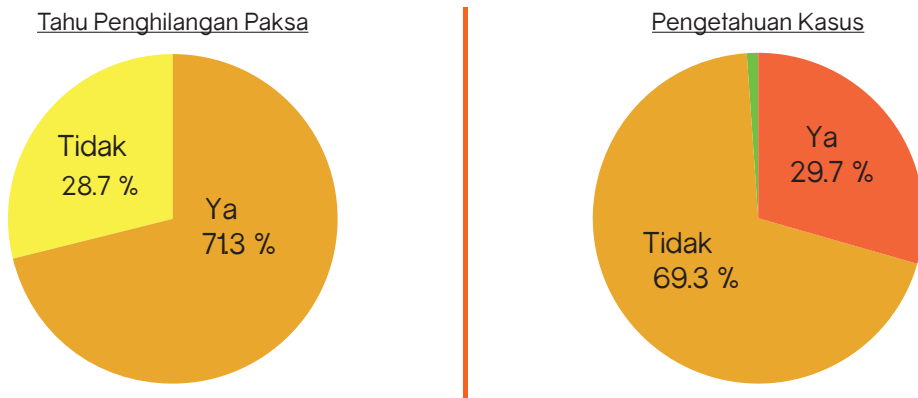
Ayu Permata, Kahfi Dirga Cahya

# Tanpa Kepedulian?

**M**eskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kasus penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia sudah menjadi momok dari prinsip demokrasi yang dipegang negara ini. Banyak LSM-LSM di Indonesia yang masih sering mengangkat jenis kejahatan ini sebagai contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum tertangani sampai sekarang. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual diharapkan bisa memberikan pengarahannya bagi masyarakat awam akan pentingnya pengusutan kasus pelanggaran HAM ini. Untuk itu diperlukan setidaknya pengetahuan mengenai kasus ini dan langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh kedepannya. Pengetahuan ini merupakan satu langkah kecil untuk menghargai dan melanjutkan perjuangan para mahasiswa tahun 97-98 yang sampai sekarang masih tidak jelas keberadaannya. Untuk itulah tim **wepreventcrime** melakukan riset terhadap 101 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UI mengenai pengetahuan mereka akan kasus penghilangan paksa.

Ternyata hanya 29 mahasiswa yang mengaku tidak tahu dengan kasus penghilangan paksa di Indonesia (28,7%). Meskipun masih dominan orang-orang yang mengetahui mengenai penghilangan paksa, hanya ada 30 orang (29,7%) mahasiswa yang bisa menyebutkan secara riil contoh kasusnya.

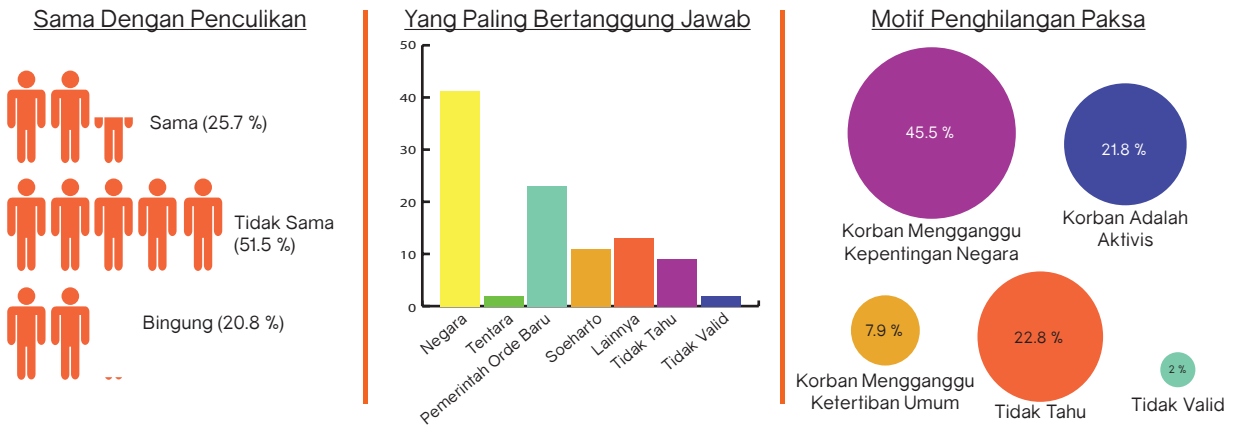
Kasus penghilangan paksa yang paling banyak disebutkan oleh responden adalah kasus Munir (22,5%). Banyak juga mahasiswa yang tidak secara spesifik menyebutkan kasus penghilangannya, melainkan hanya menuliskan bahwa orang-orang yang hilang adalah mahasiswa atau aktivis, terutama yang terjadi pada tahun 1997-1998 (17,5%). Widji Thukul, pengkritik pemerintah lewat puisi dan teater yang hilang tahun 1998, juga diketahui kasusnya oleh beberapa mahasiswa (15%).



Pengetahuan mahasiswa ini nampaknya juga disertai dengan pengetahuan definitif mengenai apa itu penghilangan paksa. Hal ini ditunjukkan dari 51,5% responden yang tidak setuju menyamakan penghilangan paksa dengan penculikan. Menurut *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, penghilangan paksa harus melibatkan agen pemerintah atau orang atau kelompok yang diberi kuasa, didukung, atau diketahui aksinya namun tidak diakui oleh negara. Dengan demikian penghilangan paksa memang berbeda dengan penculikan yang bisa dilakukan siapapun.

Para responden juga cukup mengetahui siapa-siapa saja yang mungkin bertanggung jawab atas kasus penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia, yaitu negara (40,6%), pemerintah Orde Baru (22,8%), tentara (2%), dan Soeharto (12,9%). Berdasarkan motif terjadinya penghilangan paksa, para mahasiswa juga bisa dengan jeli menebaknya. Hal ini ditunjukkan dengan 45,5% responden yang menduga korban penghilangan paksa telah mengganggu kepentingan negara. Jawaban mengenai motif dilakukannya penghilangan apabila ingin dianalisis tampak benar, sebab kebanyakan orang yang yang diculik tanpa kepastian jelas adalah orang-orang yang sering melayangkan kritikan keras pada rezim Orde Baru.



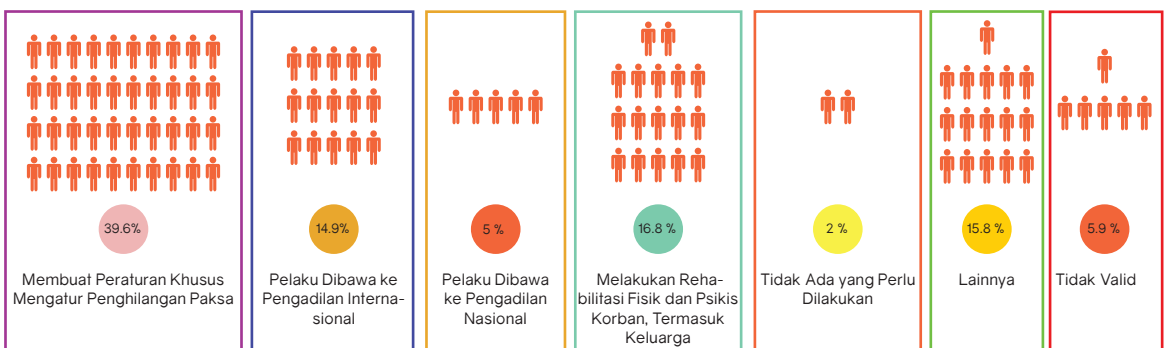


Para responden juga ditanya pendapatnya mengenai solusi terbaik apa yang bisa dilakukan terkait kasus penghilangan yang sudah terjadi. Paling banyak mahasiswa yang menjawab solusi terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan membuat peraturan khusus yang mengatur penghilangan paksa. Indonesia memang sudah menandatangani *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* namun sampai sekarang belum meratifikasinya.

Cukup banyak juga responden yang mengatakan bahwa solusi terbaik yang bisa dilakukan adalah melakukan rehabilitasi fisik dan psikis korban termasuk keluarganya (16,8%) dan membawa pelaku penghilangan ke pengadilan dalam negeri (5%). Kedua solusi ini sebenarnya adalah program kerja KontraS dan juga merupakan rekomendasi yang diberikan kepada DPR RI tahun 2009.

Sebanyak 15 mahasiswa menjawab solusi yang bisa dilakukan untuk kasus penghilangan paksa di Indonesia adalah membawa pelaku ke pengadilan internasional. Sampai sekarang yang jelas telah melakukan persidangan untuk kasus penghilangan paksa hanyalah *European Court of Human Rights* yang khusus menangani masalah-masalah pelanggaran HAM di negara Eropa. Agaknya solusi membawa kasus penghilangan di Indonesia ke pengadilan internasional masih sulit dilalui.

### Solusi Mengatasi Penghilangan Paksa



Hal menarik yang ditunjukkan di riset ini adalah cukup banyaknya mahasiswa yang menjawab kasus Munir sebagai contoh kasus penghilangan paksa. Ada juga yang menyebutkan pembunuhan Muhammad Syarifuddin, wartawan harian Bernas yang meninggal akibat penganiayaan. Keduanya apabila melihat dari kacamata konvensi internasional, tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai penghilangan paksa sebab keberadaan mereka diketahui. Barangkali karena ketenaran kedua kasus ini, mahasiswa selalu teringat tentangnya ketika ditanya mengenai pelanggaran HAM.

Dapat dilihat bahwa pengetahuan responden terhadap kasus penghilangan paksa di Indonesia sudah cukup baik. Meski tidak bisa memberikan jawaban spesifik mengenai kasusnya, mahasiswa cukup paham mengapa kasus-kasus ini bisa sampai terjadi dan pihak-pihak mana saja yang terlihat bertanggung jawab untuk kasus ini. Selain itu solusi-solusi yang dipilih mahasiswa memang sejalan dengan program kerja KontraS.

Albert Wirya, Wara Aninditari



# Di Balik Meja KontraS





Seorang bertubuh tinggi besar dan berkulit sedikit coklat ketuaan menyambut kami. Tidak lupa, kaca mata dengan frame hitam yang melekat di wajahnya. Sepertinya, orang inilah yang ingin kami temui. Senja itu, kami memang berjanji dengan beliau di kantornya yang tidak terlalu besar. Jujur, kami sedikit grogi dan takut ketika disambut olehnya. Namun, perasaan itu hilang dengan sendirinya ketika kami tim *wepreventcrime* mengobrol dengannya.

Haris Azhar, begitulah nama lengkapnya. Jika mendengar namanya, mungkin sebagian dari kita sudah mengenal siapa beliau. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia hukum dan hak asasi manusia. Maka tidak heran jika saat ini beliau menjabat sebagai Koordinator Eksekutif di sebuah NGO, yaitu KontraS (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan). Awal bergabung dengan KontraS, Haris biasa beliau disapa, hanya menjabat sebagai relawan dalam Divisi Advokasi.

Di sebuah ruang yang tersusun cukup rapi, dengan suasana yang sepi, kami mengobrol dengan beliau, tepatnya di kantor KontraS di bilangan Cikini, Jakarta Pusat. Haris memang mempunyai minat dan pengetahuan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM), khususnya di Indonesia. Itulah yang menjadi alasannya untuk bergabung dengan KontraS. Menurutnya, pelanggaran HAM di Indonesia masih kerap terjadi sampai saat ini. Walaupun demikian, bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di setiap masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi berbeda-beda.

Saat ditanya era apa pelanggaran HAM paling parah terjadi, beliau mengatakan bahwa pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru-lah pelanggaran HAM terjadi paling parah. Mungkin kita masih mengingat mengenai Peristiwa 65-66. Dalam peristiwa itu, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang yang dituduh sebagai simpatisan PKI. Peristiwa itu sendiri terjadi setelah Gerakan 30 September 1965. Menurut Haris, pada masa itulah pelanggaran HAM paling berat terjadi di Indonesia. Bahkan sampai sekarang, hampir 48 tahun, kasus tersebut belum terselesaikan.

Bukan hanya Peristiwa 65-66 saja yang belum tuntas. Masih banyak juga kasus pelanggaran HAM yang juga masih abu-abu. "Harusnya negaralah yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi. "Kan, tugas negara untuk menjamin hak asasi para warga negaranya." Mengenai peristiwa dibunuhnya Munir, Haris juga menuntut pertanggungjawaban

dari negara. Bukan hanya karena kasus Munir belum terselesaikan, menurut Haris, penyidikan dalam kasus tersebut juga terkesan ditutup-tutupi oleh pemerintah. Intinya Tim Penyidik Kasus Munir tidak transparan dalam memberikan hasil penyidikan.

Sebagai seorang aktivis HAM, tentunya tidak pernah lepas dari teror yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun dalam menanggapi, Haris terkesan santai dan biasa saja. Malahan beliau cenderung diam dalam menanggapi teror tersebut. Pernah saat itu beliau diteror melalui situs-situs jejaring sosial. Haris hanya diam dan tidak menanggapi teror tersebut. "Kalo ditanggapi malah kesenangan yang *neror*. Jadi ya didiamkan saja," imbuhnya. Dia mengaku senang bekerja dalam bidang ini, khususnya di KontraS, karena ia dapat bertemu dengan orang-orang baru yang juga mempunyai minat tentang hukum dan HAM.

Dengan menjadi seorang aktivis, Haris juga selalu memiliki empati dalam menghadapi keluarga korban pelanggaran HAM. "Berinteraksi dengan keluarga

*"Berinteraksi dengan keluarga korban dapat menambah ilmu, karena ada beberapa hal mengenai HAM yang tidak dapat dipelajari secara textbook,"*

korban dapat menambah ilmu, karena ada beberapa hal mengenai HAM yang tidak dapat dipelajari secara *textbook*," akunya. Akan tetapi, karena minatnya itu, Haris mengaku menjadi jarang pulang ke rumah. Memang penghasilan bekerja di KontraS tidak sebanding jika bekerja di lembaga pemerintahan. Bekerja di NGO seperti KontraS adalah bagaimana kita melayani masyarakat, khususnya memperjuangkan keadilan

dan pertanggungjawaban negara atas tindak pelanggaran hukum maupun HAM.

Haris sendiri mengaku tidak setuju dengan hukuman mati baik apapun itu bentuk tindak pelanggaran. Baik itu menyangkut kasus tindak pidana korupsi, pengedaran narkoba, dan terorisme. Bandar narkoba misalnya, jika pengadilan memutuskan untuk menghukum mati bandar narkoba, maka jaringan peredaran narkoba tidak dapat diungkap. "Untuk mencari jarum dalam tumpukan jerami, kita tidak perlu membakar jeraminya kan?" ucapnya dengan raut ekspresi yang serius.

Ketika ditanya sampai kapan, Haris mengaku akan terus berjuang sampai ia tidak sanggup lagi menjalani tugasnya sebagai aktivis HAM. Namun, dia berharap Negara Indonesia dapat maju dan semakin berkembang dalam menangani, menyelesaikan, dan mengayomi HAM semua penduduknya. "Mengutip perkataan Munir: KontraS akan bubar, jika negara sudah benar dalam segala hal, khususnya mengenai HAM dan hukum. Karena itulah misi dari KontraS," ucapnya penuh dengan semangat.

**Andreas Meiki Sulistiyanto**



## Kamisan: Sebentuk Aksi untuk Mereka

<WPC\_M.Luthfian> Gelar Aksi Kamisan

*Kamis itu bukan Kamis pertama mereka berkumpul. Ratusan Kamis sudah mereka lewati di tempat yang sama, setiap sorenya. Mencari segala yang 'hilang', segala yang dirasa belum selesai.*

**K**amis, 5 September 2013 lalu, tim **wepreventcrime** berangkat menuju kawasan Monumen Nasional yang berhadapan tepat dengan Istana Negara. Tim **wepreventcrime** sampai di tempat pada pukul 16.00. Sekumpulan orang berpakaian hitam sudah memadati wilayah tersebut. Mereka berkumpul untuk berjuang dan meneruskan aksi yang dikenal dengan nama 'Kamisan'. Mereka menuntut diusut dan diselesaikannya pelanggaran hak asasi manusia berat yang pernah terjadi pada masa rezim Soeharto, terutama kasus-kasus hilangnya sejumlah aktivis kala itu.

Sejak 18 Januari 2007, dengan terinspirasi dari aksi *Mother Plaza de Mayo*, aksi Kamisan ini dilakukan. Di depan Istana Negara, sebagai lambang kekuasaan di negeri ini, mereka meneriakkan nilai-nilai keadilan yang sampai sekarang belum didapatkan.

Kamisan ke-319 kemarin sedikit berbeda dari Kamisan yang biasanya. Kali itu, keadilan yang dituntut adalah keadilan untuk Munir, sebagai bentuk peringatan 9 tahun kematiannya, pada tanggal 7 September. Aksi teatrikal dan orasi pun dilakukan sebagai salah satu bentuk mengenang kematian Munir. Para aktor dalam aksi teatrikal tersebut berteriak berharap keadilan kepada para pemegang kekuasaan negara yang terus menerus diam mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi, terutama kasus Munir. "Jangan diam! Lawan!" begitu bunyi kalimat yang terus-menerus diteriakkan dalam aksi.

Partisipan di Kamisan itu bukan hanya anak muda. Banyak ibu setengah baya yang turut hadir meramaikan aksi. Walau terlihat lemah dan sudah tua, ibu-ibu itu masih bersemangat untuk mengikuti aksi

Kamisan.

"Mereka ibu atau istri dari aktivis yang hilang pada tahun '98," ujar mas Azhar selaku koordinator KontraS—Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menceritakan sedikit latar belakang sekelompok ibu setengah baya itu.

Salah satu dari ibu-ibu yang datang pada aksi Kamisan itu adalah ibu Imas. Beliau bercerita sedikit tentang kejadian yang menimpa anaknya saat kerusuhan tahun 1998.

"Anak saya, Khalid, hilang sehari setelah kerusuhan di Mall Jogja yang sampai dibakar itu. Waktu itu dia masih sekolah di STM.

Setelah pulang buat shalat, dia izin mau main. Saya bilang jangan keluar-keluar dulu, tapi dia bilang mau main sebentar. Sampai sekarang dia belum pulang, sudah 15 tahun belum pulang," tutur ibu Imas. Itu baru satu dari banyak cerita lainnya.

Sudah 15 tahun berbagai cara telah ditempuh ibu Imas; mulai dari pengaduan ke Kodam Jaya, meminta bantuan tim relawan kemanusiaan, meminta bantuan pihak pemerintah yang dibantu oleh KontraS, mengirimkan surat ke Presiden, mendatangi DPR dan banyak cara serta kegiatan lainnya.

Ketika ditanya mengenai harapan ibu Imas, beliau hanya berharap akan mendapat keadilan dan menemui titik terang mengenai keberadaan anaknya, setidaknya sebelum beliau meninggal. "Selama saya masih mampu, saya bakal terus berjuang buat anak saya" ujarnya.

**Tua Maratur Naibaho, Miranda Olga Viola**



<WPC\_M.Luthfian.> Ibu Imas, peserta Aksi Kamisan





# Sedikit Cerita Diujung Sana

*Banyak hal yang belum diceritakan. Banyak hal yang masih disembunyikan. Berikut adalah beberapa cerita mengenai permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat serta penghilangan orang secara paksa oleh negara.*

## DISINI TIDAK ADA TUHAN

Begitulah kalimat ejekan yang diucapkan oleh Tentara di Markas Pomdam Jaya, Guntur, kepada korban kekerasan kasus Tanjung Priok yang ditangkap pada tanggal 15 September 1984. Syaiful Hadi bersama 6 (enam) orang lainnya hanya bisa mengucapkan "Astagfirullah" ketika mereka mendengar hinaan tersebut sembari badannya disiksa dengan tongkat dan sepatu lars tentara.

## KEGAGALAN BERKOMITMEN

Belum dijalankannya 4 (empat) rekomendasi Pansus DPR tentang penghilangan orang secara paksa secara jelas mempertanyakan komitmen Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam menjalankan penegakan hukum yang menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Empat rekomendasi yang dibuat 30 September 2009 tersebut isinya adalah: meminta agar presiden segera membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc; melakukan pencarian terhadap 13 orang yang masih dinyatakan hilang; merehabilitasi dan memberi kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang; serta meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

## NAMBAH SATU

Tanggal 24 Maret tahun 2000 KontraS menerima laporan dari sebuah keluarga bahwa anggota keluarganya juga hilang dalam periode April-Mei 1998. Nama pemuda tersebut adalah Wiji Thukul. Pemuda ini dilaporkan masih bertemu dengan temannya di sekitar bulan tersebut namun kemudian sama dengan pemuda-pemuda lainnya, ia tidak kunjung pulang maupun ditemukan. Adanya persamaan antara latar belakang Wiji Thukul dengan ke-23 orang yang diculik, yakni seorang aktivis yang aktif menjelang jatuhnya Soeharto. Bila mengikutsertakan Wiji Thukul sebagai orang yang dihilangkan, maka korban penghilangan menjadi 24.

## EMPAT BULAN

Tahun 1998, hanya dalam waktu empat bulan saja, 23 aktivis pro-demokrasi dinyatakan hilang secara misterius. Tiga orang diculik pada bulan Februari, sembilan orang di bulan Maret, dua orang di bulan April, dan sembilan orang lainnya dinyatakan hilang di bulan Mei.

## NOL

Pada 12 Mei 1998, ditengah demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Trisakti, empat aktivis yaitu Elang Mulya Lesmana, Hendrawan Sie, Heri Hertanto, dan Hafidin Roiyan tewas akibat terjangan peluru. Tak ayal kerusuhan pun terjadi, Jakarta porak-poranda. Berdasarkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), terdapat 1190 orang mati terpanggang, 27 orang meninggal karena senjata tajam, 52 korban pemerkosaan, dan 850 bangunan terbakar. Namun, hingga kini, tidak ada satupun orang yang diperiksa serta dimintai pertanggungjawaban di pengadilan terkait kekacauan tersebut. Penguasa hanya menutup mata, dan menutupi semua fakta dari kasus ini.

## CELANA DALAM

Syaiful Hadi, beserta dengan sekitar 60-an orang korban peristiwa Tanjung Priok yang dimasukkan ke dalam ruangan tahanan di Guntur, melaksanakan Shalat Shubuh berjamaah hanya dengan menggunakan celana dalam yang berlumuran darah. Saat mereka semua ditangkap, seluruh pakaian mereka dilucuti dan dibuang entah kemana oleh anggota Tentara di Markas Pomdam Jaya.

## TAHAP KEDUA

Penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi dilakukan dalam tiga tahap, dengan total 23 orang yang dihilangkan. Jumlah orang-orang yang dihilangkan berbeda di tiap tahapnya dan beberapa dari mereka diambil secara paksa di luar Jakarta. Dari ketiga tahap penculikan tersebut, hanya orang-orang yang diculik pada tahap kedua saja yang dibebaskan. Tidak ada satupun dari orang-orang yang diculik pada tahap ke-satu dan ketiga muncul.

Nabila Riyas Putri, Yanuar Permadi



## Surat untuk Penguasa Negeriku

*Untuk penguasa negeriku, aku ingin kau tau, 15 tahun sudah ku tak berjumpa dengan keluargaku. Putra - putriku, istriku tercinta, begitupun la sanak saudaraku di kampung halaman. Tak mampu berkabar, apalagi bercengkrama bersama.*

*Kau harus tau, 15 tahun sudah aku menunggu sekedar penjelasan bagiku, mengapa kau renggut aku dari keluargaku? Sebesar apa salahku padamu hingga kau perlakukan aku seperti ini?*

*Seharusnya kau tau, aku bukanlah siapa - siapa. Hanya seorang rakyat yang mencari nafkah bagi keluarganya. Bukanlah ancaman bagi negara apalagi menyimpan rahasia negara. Hanya pria biasa beranak dua.*

*Untuk penguasa negeriku, sudahkah kau memberi kabar untuk anak istriku? Sanak saudaraku? Tidakkah kau tau kalau mereka menunggu? Menanti kepulanganku sejak belasan tahun lalu.*

*Tak mampu lagi aku membayangkan wajah sedih anak - anakku, tangisan pilu istriku yang telah ribuan hari menunggu kepulanganku. Kembali ke pelukan mereka, kembali utuh menjadi keluarga.*

*Izinkan aku memohon, kembalikan aku kepada keluargaku, kepada sanak saudaraku. Tak ibakah kau membiarkan mereka menunggu, setiap malam menangis pilu? Menanti kabar dariku.*

*Jika memang tak mungkin kau memulangkanku, setidaknya, berikanlah kabar kepada keluargaku. Entah hanya sepucuk surat, atau kabar dimana rimbaku. Jangan biarkan mereka terus menunggu.*

*Untuk penguasa negeriku, bagaimana kabar teman - temanku? Mereka yang kau renggut pula dari keluarganya, mereka yang kau biarkan bersedih anak istrinya. Mereka yang belasan tahun kau biarkan bertanya-tanya. Mereka yang senasib denganku. Yang bagai hilang ditelan bumi.*

*Sekali lagi aku memohon. Atas namaku dan teman - temanku, kembalikan kami kepada keluarga kami. Atau setidaknya sampaikanlah kabar kepada keluarga kami. Jangan kau biarkan mereka terus menunggu, menanti dan bertanya-tanya.*

*Untuk penguasa negeriku, atas nama hati nurani, tolonglah kabulkan permohonan kami, jangan kau biarkan kami terus dicari, terus dinanti, tanpa ada kabar pasti. Apalagi permohonan maaf kepada keluarga kami, yang 15 tahun kau biarkan menanti.*

Harris Kristanto





# Hilang Yang Berbeda

*Marilah sejenak lupakan kasus seseorang yang mengaku intelek dengan menggunakan bahasa yang tidak karuan. Negara ini tidak membutuhkan kontroversi terbaru, melainkan membutuhkan penyelesaian kontroversi-kontroversi terdahulu.*

**H**ai guys, perkenalkan, saya adalah oknum. Ya kalian tidak perlu tahu saya siapa. Saya laki-laki, berperawakan tambun, cukup tegap, mata saya memiliki kantung, dan ya... saya sudah hampir 9 tahun memimpin suatu negara. Masih belum tahu juga siapa saya?

Banyak masyarakat di negara saya yang bertanya-tanya, "Pak, kenapa sih matanya berkantung seperti itu? Apa kasur yang disediakan oleh negara kurang empuk, sehingga tidur bapak kurang nyaman?". Mendengar pertanyaan ini, jujur saya prihatin. Jika saya boleh untuk jujur, kantung mata saya yang berwarna kehitaman ini sebenarnya menampung air mata keprihatinan saya. Ya, saya memang memprihatinkan. Tisu mana tisu?

Air mata yang ditampung dalam kantung ini bukanlah tanpa alasan. Sebenarnya, saya cukup kecewa melihat bagaimana rakyat saya memperlakukan saya. Apa yang saya terima, tidaklah sama dengan apa yang orang lain terima. Dalam hal ini, yang saya maksud adalah 'hilang'. Jelasnya, ini tentang hilangnya saya dengan korban kasus penghilangan orang secara paksa yang pernah terjadi di Indonesia.

Saya cukup malu untuk menceritakannya. Ya, saya memang seseorang yang pemalu, dan jika saya sudah malu, maka saya akan 'menghilang'. Bukan, saya bukan makhluk halus, bukan juga pemeran Jinny di sinetron Jinny oh Jinny terdahulu, yang sekali ke-dip langsung hilang. Akan tetapi, penghilangannya saya tidak mendapat respon masyarakat yang sama dengan hilangnya para pahlawan revolusi. Padahal, kami sama-sama menghilang. Sungguh, teganya dirimu teganya teganya teganya ooo pada diriku.

Sebagai contoh, ketika kasus penghilangan aktivis pada tahun 1997-1998 terjadi, masyarakat langsung merespon dan menuntut secara hukum. KontraS pun didirikan untuk membela hak asasi manusia yang sudah dilanggar tersebut. Respon positif tersebut terus berlanjut hingga sekarang. Hal tersebut berbanding terbalik ketika saya yang menghilang. Saya dulu menghilang karena saya malu. Ketika kasus yang disebut *Cicak vs Buaya* sedang panas-panasnya, saya yang tidak tahu harus berbuat apa akhirnya berinisiatif untuk menghilang. Eh, bukannya dihormati atau dicari, saya malah dicaci maki. Bahkan sampai beredar selebaran 'Berita Orang Hilang' yang men-



cantumkan nama dan foto saya. Hal tersebut tidak dapat diterima. Bukan karena isi tulisan di selebaran itu yang cukup provokatif dan menyudutkan saya, tetapi karena foto saya disitu kurang bagus, senyum saya kurang greget disitu.

Saya akui, memang terdapat perbedaan antara kasus menghilangnya aktivis dengan menghilangnya saya. Ketika para aktivis pejuang reformasi ditangkap dan dihilangkan, tujuannya jelas, untuk menghilangkan suara-suara provokatif yang dapat memicu semangat juang masyarakat untuk menjatuhkan negara, maksud saya menjatuhkan para pejabat dan penguasa negara. Beda dengan saya, ketika saya menghilangkan diri saya sendiri, tujuannya lebih jelas, untuk menyiapkan suara-suara provokatif yang menghimbau masyarakat untuk membangun bangsa. Bukti nyatanya, tiga album pop langsung keluar. Noah? Mas Anang? Lewat, tidak sebanding dengan album saya.

Oh iya, sebelum saya akhiri, ya sedikit narsis tidak apa-apalah, ya? Saya orangnya bukan hanya sekedar suka 'menghilang', tetapi juga suka 'menghilangkan'. Saya suka menghilangkan beberapa aset negara, yang menurut laporan KPK, sekitar Rp 200 Triliun. Pemerintah negara yang hobi 'menghilangkan' sesuatu hal, seperti slogan di iklan wafer kaleng, "sudah tradisi". Saya rasa semua cukup jelas, jadi tidak ada yang perlu diprihatinisasikan. Akhir kata, mari bersama kita ucapkan, "saya prihatin".

Yanuar Permadi



## Kenali Kampusmu

**S**udahkah kalian merasa aman ketika beraktivitas di Universitas Indonesia? Kurangnya sumber daya keamanan dirasa menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kejahatan. Jadi dengan cara apa agar kita merasa aman jika berada di lingkungan Universitas Indonesia?

Dengan begitu luasnya lingkungan Universitas Indonesia (terutama di Kampus Depok), akan sangat banyak sekali tempat-tempat yang rawan tindak kejahatan. Selain itu, bukan hanya masyarakat UI saja yang beraktivitas di sini, masyarakat sekitaran UI juga sering beraktivitas di sini. Oleh karena itu, tindak kejahatan dalam bentuk apapun dapat

terjadi di lingkungan Kampus UI Depok. Sebagai masyarakat UI, kita juga tidak bisa terus berharap pada sumber daya keamanan untuk menciptakan rasa aman, atau bahkan suasana yang aman. Maka, itu semua kembali pada diri kita masing-masing untuk selalu waspada dan berhati-hati ketika beraktivitas di Kampus UI. Salah satu caranya adalah "kenali kampusmu."

Dengan mengusung tema Kenali Kampusmu, kami redakis weprevent-crime akan memberikan sebuah edisi khusus mengenai Lingkungan Kampus Universitas Indonesia Depok, tentunya dari segi keamanan. Ditunggu ya?

Redaksi

## Kompetisi : Olimfis 2013

**R**iuh suara mahasiswa berbagai jurusan di FISIP berkumandang menjadi satu. Yel-yel dari jurusan masing-masing terus membahana demi mendukung kontingen atletis jurusan mereka. Satu tujuan mereka, juara umum. Dengan 10 cabang olah raga yang dipertandingkan dalam kompetisi ini, dan total 50 emas yang diperebutkan oleh 8 jurusan, kompetisi ini merupakan kompetisi yang penuh dengan gengsi untuk menjadi juara.

Olimpiade FISIP 2013, biasa disebut dengan Olimfis 2013, merupakan kompetisi olah raga tahunan FISIP UI. Namun, kompetisi ini berbeda dengan kompetisi sebelumnya. Olimfis 2013 kali ini merupakan peleburan 2 kompetisi olah raga sekaligus, Rokie FISIP Championship (RFC) yang merupakan kompetisi olah

raga untuk mahasiswa baru FISIP dan Olimfis itu sendiri. Maka Olimfis 2013 dibedakan menjadi kelompok senior dan kelompok junior. Namun, penghitungan perolehan medali tidak dilakukan secara terpisah.

Walaupun dalam Olimfis 2013 ini memperebutkan 50 medali emas, tetapi aura kompetisi hanya dapat dirasakan oleh sebagian mahasiswa FISIP UI. Padahal Olimfis 2013 merupakan kompetisi olah raga tahunan mahasiswa FISIP UI. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya sosialisasi perihal Olimfis 2013 kepada seluruh elemen FISIP UI.

Kedepannya semoga kompetisi olah raga di FISIP UI dapat menciptakan aura kompetitif namun tetap menjunjung tinggi sportifitas. "Boleh Keras, Boleh Panas, Asal Jaga Sportifitas."

# MARI BERKARYA



@wepreventcrime

Kirim karyamu dalam bentuk tulisan foto, video dan lain sebagainya ke [wepreventcrime@yahoo.com](mailto:wepreventcrime@yahoo.com)

Karya kamu akan dimuat di [wepreventcrime.wordpress.com](http://wepreventcrime.wordpress.com)







# TERIMA KASIH

KEPADA  
ATLIT DAN SUPORTER KRIMINOLOGI

ATAS PARTISIPASI, KONTRIBUSI  
DAN SEMANGAT DALAM  
OLIMPIADE FISIP UI 2013

NEXT ON OKTOBER:  
ANTIDISKRIMINASI 3  
PIL KRIM  
ADKESMA DAYS



## Utuh yang Setengah Part -3



WPC <Lilya>

**O**mbrolan - obrolan singkat itu berlangsung hingga minggu - minggu berikutnya. Hingga suatu ketika ada yang berbeda. Hari itu adalah hari Minggu seperti biasa, aku menunggu kedatangan dia dan bersiap menyambutnya di pintu utama hotel. Tepat pukul 19.30 malam kulihat mobilnya memasuki parkir hotel, namun ada yang berbeda malam itu. Dia tidak sendiri, ada seorang pria tinggi besar berpostur tegap dengan pakaian rapi berjalan bersamanya memasuki *lobby* hotel. Tidak seperti biasanya, dia berjalan tertunduk dan diam seribu bahasa ketika melihaiku berdiri di pintu untuk menyambutnya. Lidahku kaku, tak bisa berkata apa - apa melihat kejadian itu. Tanpa basa - basi, mereka langsung naik lift menuju kamar mereka. Dan tinggallah aku dengan semakin banyak pertanyaan di dalam hati.

"Dan, ngapain sih? Kok dari tadi tamu favorit lo itu dateng tapi lo malah diem - diem aja gitu??" tanya Andri yg semenjak tadi ternyata memperhatikanku.

"Eh, gak! Ga ada apa - apa! Ke parkir an basement yok! Gue pengen ngerokok nih!"

Kami pun menuju parkir an basement, tempat aku menemukan dia pingsan karena mabuk berat.

"Lo liat gak tadi laki - laki yang sama tamu favorit gue check in??"

"Yang biasa check in di 206 maksud lo dan? Liat gw! Serem ya, itu suami atau body guard ya?? Gede gitu!"

"Justru gue mau tanya sama lo. Kira - kira itu siapa ya?" timpalku.

Kami berdua pun terdiam karena tidak menemukan jawaban atas pertanyaan bersama barusan. Tak terasa waktu berlalu cukup cepat, sudah lebih dari tiga batang rokok yang masing - masing dari kami sudah habis kan. Kami pun kembali ke *pantry*.

Aku melanjutkan pekerjaanku berusaha mengalihkan pikiran dari pertanyaan siapakah laki - laki yang bersama dia tadi. Memang itu benar - benar bukan urusanku yang bukan siapa - siapa untuk dia. Namun, ada sesuatu yang kulihat dari sikapnya tadi, bahasa tubuhnya yang menunjukkan kesedihan bah-

kan ketakutan yang membuatku tak bisa melepaskan dia dari pikiranku. Dalam lubuk hati aku hanya bisa berharap esok pagi kami akan berbincang lagi dan aku bisa bertanya kepada dia.

Jam tanganku menunjukkan jam 12 malam dan rokok di kantong celanaku telah habis, aku memutuskan untuk pergi keluar hotel dan membeli sebungkus rokok di warung seberang jalan. Aku memutuskan untuk menghabiskan dua batang rokok yang kubeli di warung itu karena tak ada pekerjaan menungguku dan Andri pun telah pulang karena besok *shift* pagi. Dari kejauhan kulihat sesosok pria keluar dari *lobby* hotel dan menuju kemari.

"Bang, mild satu bungkus!" pria itu berkata dengan nada gugup dan terburu - buru.

"Makasih!" pria itu bergegas pergi.

Aku terkejut ketika aku mengetahui bahwa pria tadi adalah pria yg sama yang datang bersama dia. Karena penasaran aku memutuskan untuk mengikuti pria itu, karena aku merasakan ada yang tidak beres dengan gelagatnya. Ternyata benar, pria itu tidak kembali ke kamar 206 tetapi menuju parkir an dan meninggalkan hotel dengan mobil dia. Aku bergegas ke *lobby*.

"Tin, itu kamar 206 udah check out?" Tanyaku penasaran pada Tina.

"Sebentar..."

"Belom Dan, emang kenapa??"

"Gak, tanya aja"

Semakin resah hati ini dengan pertanyaan - pertanyaan yang benar - benar membuatku bingung, ada apa sebenarnya antara dia dan pria itu.

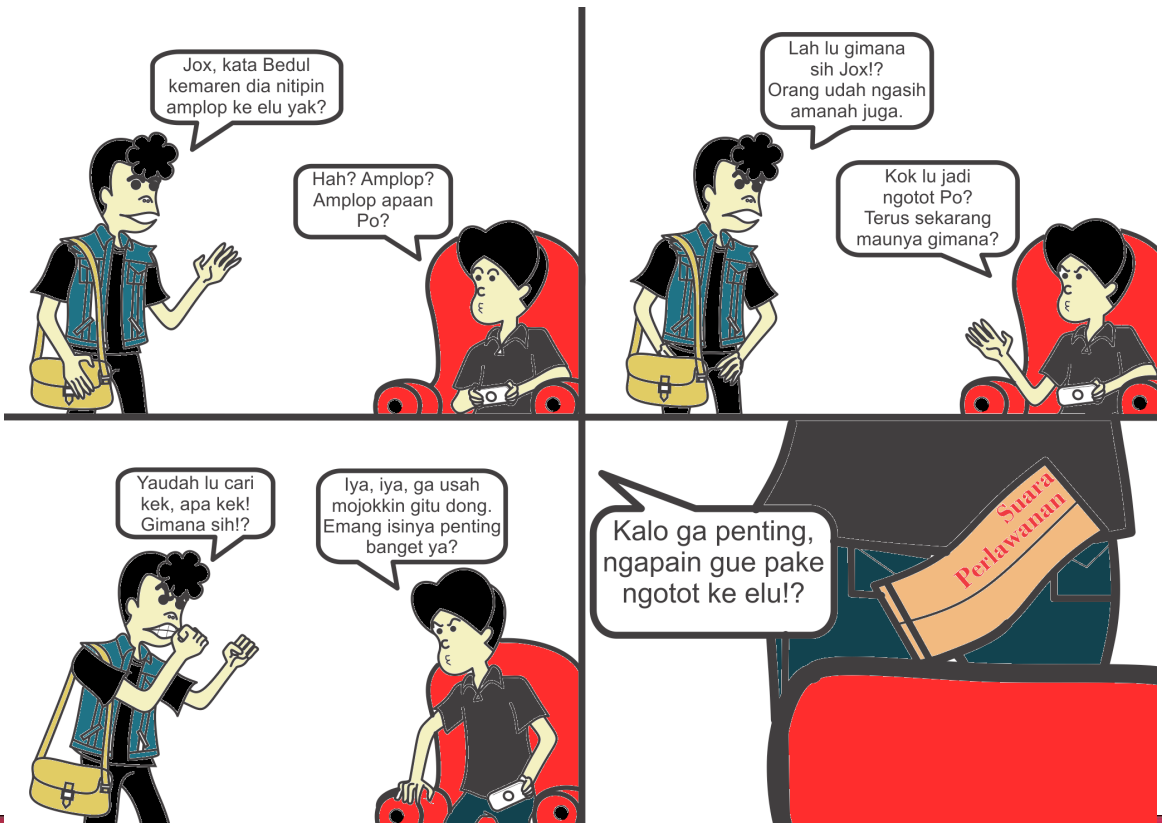
Malam pun semakin mendekati pagi, aku bisa merasakan kantuk sudah menggelantungi matakku. Namun dalam hati ini ada bisikan yang menahan ku untuk tetap terjaga. Kedatangan dia malam tadi benar - benar janggal. Momen itu tak bias lepas dari rekam ingatanku. Setelah memantapkan hati, aku memutuskan untuk naik ke kamar tempat dia menginap untuk mengetahui keadaan dan mengobati rasa khawatirku.

Harris Kristanto





# Titipan Yang Hilang



Departemen Olahraga  
BEM FISIP UI 2013  
Bergerak Memberi Arti



# OLIMFIS 2013

Ketika Setiap Kontribusi Diperhitungkan

9 SEPTEMBER - 9 OKTOBER

#SATUFISIP

@OlimfisUI

f: Olimpiade FISIP UI

t.: Olimfis2013.tumblr.com

Narahubung: Dika 08998919891 Abe 08999342329/282E605D

Teater Sastra UI Mempersembahkan  
MULTI-MONOLOG  
**SELINGKUH**

Naskah/Sutradara:  
I. Yudhi Soenarto

Ticketing:

**JOCELYN (+62 812-4103-9359)**

Ticketing Online:

[www.selingkuh.teatersastraui.org](http://www.selingkuh.teatersastraui.org)

[www.teatersastraui.org](http://www.teatersastraui.org)

Social Media:

 **Teater Sastra UI (Tetas UI)**

 **@tesasui**

GRAHA BAKTI BUDAYA,  
TAMAN ISMAIL MARZUKI  
24-26 OKTOBER 2013  
PUKUL 19.30 WIB

“Di negeri penuh monolog,  
Bagaimana kita berhasrat,  
Merebut kuasa,  
Mencari cinta?

Pada siapa bisa setia?”

Didukung Oleh:



CIPTA

UNIVERSITAS INDONESIA